

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024 URUSAN PENANAMAN MODAL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban berdasarkan program dan kegiatan;
5. Peraturan Daerah NTT Nomor 3 tahun 2024 tanggal 29 Desember 2022, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 ;
7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 84 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal ;
8. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 ;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DPA/A.1/ 2.18.0.00.0.00.01.0000 / 001/ 2024, Tanggal 29 Desember 2023.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DPPA/A.1/2.18.0.00.0. 00.01.0000/001/2024 tanggal 05 Juli 2024.

1.2 Visi dan Misi

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTT dalam RPJPD Timur Tahun 2005 – 2025 yaitu **“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESSATUAN REPUBLIK INDONESIA** “dengan asumsi makmur, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator – indikator kualitas indeks pendapatan masyarakat; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, kelautan, perikanan dengan indikator – indikator ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup yang terukur.

Untuk mencapai Visi tersebut ada 7 (tujuh) Misi Pemerintah Provinsi NTT dalam RPJPD Tahun 2005 – 2025, adalah :

1. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global;
3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan;
5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan;
6. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat;
7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

Dari 7 (tujuh) Misi yang ada 1 (satu) misi yang berkaitan erat dengan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Misi 4 : **Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan.**

1.3 Data Umum Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT

- ❖ Data Umum PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT.

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- ❖ Kepala Dinas

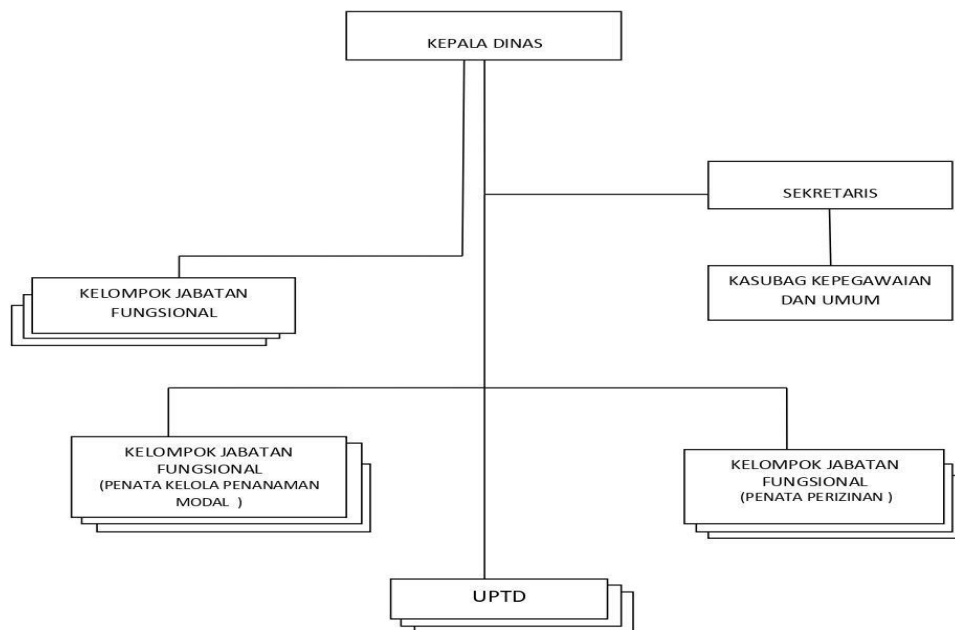
- ❖ Sekretaris

- ❖ Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Selain itu ada 2 (dua) Jabatan Fungsional, yaitu Pejabat fungsional perencana ahli muda, yang mengkoordinir substansi perencanaan, program, data dan evaluasi dan Fungsional Kebijakan Keuangan Daerah (belum terisi), yang mengkoordinir substansi bagian keuangan.

- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal dan Jabatan Fungsional Substansi PTSP. Substansi Penanaman Modal, saat ini Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya (1 orang) dan 2 (tiga) orang Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, fungsional Ahli Pertama belum ada, sementara proses dengan BKD. Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, saat ini Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya, 1 orang dan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda, dan Ahli Pertama belum ada. Untuk fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama untuk penanaman modal dan PTSP, sementara proses oleh BKD.

GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Total jabatan struktural yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)) Prov. NTT sebanyak 3 (Tiga) jabatan struktural dengan rincian eselon sebagai berikut:

- ❖ Eselon II : 1 orang
- ❖ Eselon III : 1 orang
- ❖ Eselon IV : 1 orang (Jabatan Kasubag Kepegawaian dan Umum)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 84 Tahun 2023 tersebut, DPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, Kasubag Umum dan Kepegawaian dan 2 (dua) Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan. Masing-masing kelompok jabatan fungsional ditunjuk 1 (satu) orang Fungsional Ahli Madya sebagai Koordinator atau Penanggung Jawab, yaitu Koordinator / Penanggung Jawab Substansi Penanaman Modal dan Koordinator/Penanggung Jawab Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Total jabatan struktural yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)) Prov. NTT sebanyak 3 (Tiga) jabatan struktural dengan rincian eselon sebagai berikut:

❖ Eselon II : 1 orang

❖ Eselon III : 1 orang (Sekretaris)

❖ Eselon IV : 1 orang (Jabatan Kasubag Kepegawaian dan Umum) Untuk mendukung dan menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT memiliki Jabatan Fungsional Tertentu Penyetaraan sebanyak 5 orang (Ahli Madya 2 Orang, Ahli Muda 3 orang) dan Fungsional Tertentu sebanyak 3 orang (Perencana Pertama, Pranata Komputer, Arsiparis Mahir) dan Fungsional Umum / Pelaksana sebanyak 46 Orang. Jadi total keseluruhan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT sampai dengan Desember Tahun 2024 yaitu 54 orang. Menurut jenis kelamin jumlah pegawai laki-laki 25 orang (46,3 %) dan perempuan 29 orang (53,7%). Selain PNS, ada 19 (sembilan belas pegawai honorer (pegawai tidak tetap) yang bekerja sebagai operator komputer, sopir, cleaning service dan tenaga pengamanan kantor. Data Jumlah Pegawai dan 10 Jenjang Pendidikan pada masing-masing unit kerja, sebagaimana pada Tabel 1 berikut:

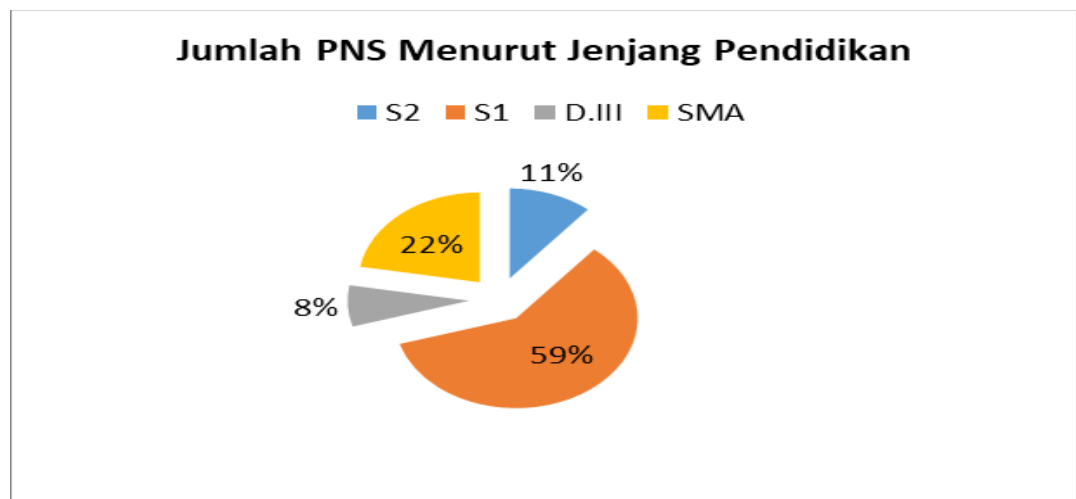
Tabel 1.1 Data Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan di DPMPTSP Provinsi NTT
Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Total	Jumlah Pegawai		Pendidikan				
			L	P	SMP	SMA	D3	S1	S2
1.	Sekretariat	26	15	11	-	10	1	12	3
2.	Substansi Penanaman Modal	15	5	10	-	1	-	12	2
3.	Substansi PTSP	13	5	8	-	1	3	8	1
	Total	54	25	29	-	12	4	32	6

Sedangkan menurut jenjang pendidikan, Jumlah PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut jenjang pendidikan : Jenjang pendidikan PNS DPMPTSP Prov. NTT terdiri dari : S2 6 orang (11 %), S1 32 orang (59 %), D.III 4 orang (8 %) dan SLTA/SMA 12 orang (22 %). Dari komposisi yang ada

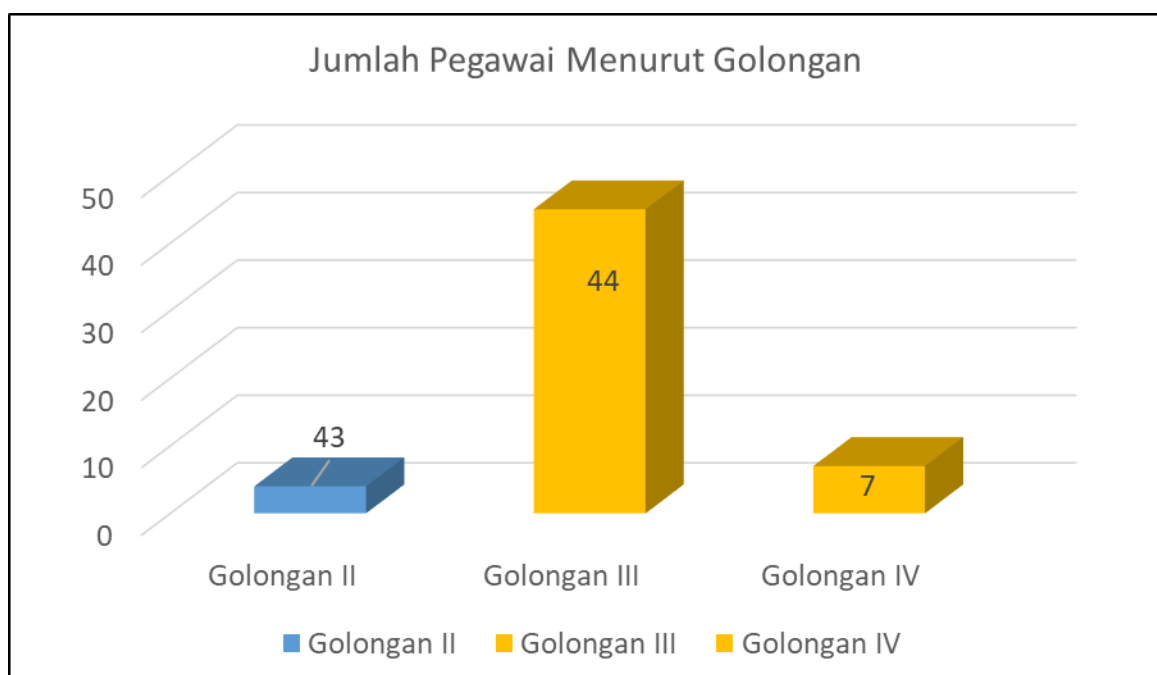
masih belum memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada terutama untuk tenaga bidang TIK. Untuk peningkatan kapasitas pegawai perlu dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerja.

Komposisi SDM dari segi jenjang pendidikan sebagaimana pada Gambar 1.2 sebagai berikut:



Dari jumlah pegawai 54 orang tersebut terdiri dari : pejabat struktural 3 orang, Fungsional Ahli Madya 2 orang, Fungsional Ahli Muda 3 orang dan fungsional tertentu ada 3 orang staf sebanyak 43 orang. Jumlah PNS menurut Golongan : Golongan IV : 3 orang, Golongan III : 44 orang, Golongan II : 7 orang.

Gambar 1.3 .Data Jumlah PNS Menurut Golongan



- **Sumber Daya Manusia Dinas PMPTSP Provinsi NTT**

Sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan faktor penentu utama untuk melaksanakan roda organisasi yang perlu mendapat perhatian baik aspek kualifikasi maupun kuantitas dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kinerja organisasi demi terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Organisasi.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT sebagai instansi teknis yang diberi tanggung jawab dalam sektor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tentunya membutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis. Saat ini ada 3 (tiga) orang tenaga fungsional yaitu Fungsional Perencana, 1 (satu) orang, Fungsional Pranata Komputer, 1 (satu) orang dan Fungsional Arsiparis, 1 orang.

Dari aspek peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pegawai, setiap tahunnya dilakukan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, workshop melalui kegiatan-kegiatan yang dialokasikan anggarannya dalam APBD Provinsi NTT maupun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah lainnya. Adapun uraian jenis pelatihan teknis yang diikuti dan pegawai yang memiliki sertifikat keahlian, sebagaimana pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Data Jenis Diklat Teknis & Fungsional Yang Diikuti s/d Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Bersertifikat	Keterangan
1.	Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	4 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
2.	Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	4 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
3.	Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan, SP & SOP	15 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
4.	Aplikasi LKPM Online	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
5.	Pengelolaan Keuangan & Bendahara	5 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & KPPN
6.	Perencanaan Penanaman Modal	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
7.	Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, LKIP, IKU-PK) & Akuntansi Keuangan (Akrua), Perbendaharaan	7 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat& Daerah
8.	Pengadaan Barang dan Jasa	4 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
9.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Anjab dan ABK	5 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Daerah
10.	Design Pembuatan Materi Promosi (Video, Poster, Bulet, dll)	3 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
11.	Pemetaan dan GIS	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan MCI / Bappeda
12.	Diklat teknis lainnya	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Badan Diklat Provinsi NTT
13.	Pelatihan Teknis Pelayanan Prima	20 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh

				DPMPTSP Provinsi NTT
13.	Pelatihan teknis Aplikasi Online Single Submission (OSS)	7 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh Kemenkoperekonomian (Tahun 2018).
14.	Pelatihan Di Bidang Wisata	2 Orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
15.	Bimtek OSS – RBA	30 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi NTT
16.	Bimtek Pengisian LKPM Online	44 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi NTT
17.	Bimtek OSS – RBA 2024	40 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh BKPM RI

- **Sarana, Prasana & Fasilitas Penunjang**

DPMPTSP merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik, sehingga membutuhkan fasilitas dan sarana prasarana penunjang yang memadai sesuai standar pelayanan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas didukung dengan sarana dan prasarana gedung kantor, peralatan/mesin (komputer, laptop/notbook) dan fasilitas kendaraan operasional. Sesuai data yang ada kendaraan Roda 4 sebanyak 3 unit. Data Nilai Aset pada DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2018 s/d 2023. Jenis dan Nilai Aset Tahun 2023 mencapai Rp.15.608.732.014,76 (Lima Belas Miliyad Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Empat Belas Rupiah Koma Tujuh Puluh Enam Sen). Data Aset dan Nilainya Masing-Masing sebagaimana digambarkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 1.3

Data Jenis dan Nilai Aset Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2018 s/d 2023

Uraian	Nilai Aset(Rp.)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tanah	-	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	2.600.910.310	2.275.593.997	4.326.037.355,00	1.462.980.765	329.762.400	53.029.771,43
Gedung dan Bangunan	16.946.912.143	16.564.056.722,40	17.261.199.025,00	15.884.008.761,40	15.193.560.800,40	14.808.361.130,30
Jalan, Irigasi dan Jembatan	856.912.665	855.824.861,43	920.714.775,00	794.363.519,25	734.235.509,81	739.859.113,03
Aset tetap lainnya	7.482.000	7.482.000,00	7.482.000,00	7.482.000	7.482.000	7.482.000
Konstruksi dan Pekerjaan	-	-	-	-	-	-
Jumlah	20.412.217.118	19.702.957.580,97	22.515.433.155,00	18.148.835.045,65	16.265.040.710,21	15.608.732.014,76

BAB II

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN & BELANJA KEADAAN S/D BULAN DESEMBER TAHUN 2024

2.1. Program/Kegiatan APBD Provinsi NTT

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, setiap tahun dialokasikan anggaran APBD Provinsi NTT, dan besarnya cenderung fluktuatif (naik/turun), tergantung situasi dan kondisi keuangan daerah. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) DPMPTSP Provinsi NTT, Tahun Anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana APBD 30 Murni sebesar Rp. 10.257.590.908,- kemudian dalam DPPA Perubahan terakhir ada penyesuaian sehingga Pagunya berubah menjadi Rp. 9.615.756.908, realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 : Rp. 8.752.432.048 (91,02%), sisa anggaran Rp. 1.505.158.860 (8,98%). Sisa anggaran yang paling banyak adalah dari Belanja Gaji dan Tunjangan PNS : Rp. 1.100.433.839 (73,11%), sisanya dari beberapa kegiatan rutin dan program/kegiatan urusan wajib, yang masih ada sisa anggaran. Alokasi Belanja Langsung/Belanja 5 Program Urusan Wajib cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2024 Belanja Langsung /Program Wajib Urusan Penanaman Modal, (5 Program dan 6 kegiatan 11 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 2.601.398.470,- dengan realisasi sebesar : Rp. 1.466.995.505,- (56,39%) sisa anggaran sebesar Rp. 1.134.402.965,-. Data Pagu dan Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 1.4

Data Pagu dan Realisasi Anggaran perprogram/KegiatanTahun Anggaran 2024
DPMPTSP Provinsi NTT

No.	UraianKegiatan	Pagu Anggaran(RP.)	Realisasi(Rp.)	Sisa(Rp.)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.014.358.438	6.398.534.343	1.257.658.095
1.	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	253.557.500	228.273.250	25.284.250

	Sub kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	24.907.900	92.100
	Sub kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	10.042.500	10.036.350	6.150
	Sub kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	20.000.000	19.940.700	59.300
	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.515.000	173.388.300	25.126.700
2.	Kegiatan: Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	6.191.359.000	5.090.880.036	1.100.478.964
	Sub kegiatan: Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	6.181.359.000	5.080.925.161	1.100.433.839
	Sub kegiatan: Kordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran	10.000.000	9.954.875	45.125
3.	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.0000	9.954.875	156.830
	Sub kegiatan: PenatausahaanBarangMilik DaerahpadaSKPD	5.000.0000	4.883.161	116.839
4	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah	10.000.000	9.870.300	129.700
	Sub kegiatan: Pedataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian	10.000.000	9.870.300	129.700
5.	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.867.400	194.174.985	46.692.415
	Sub kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	9.995.000	9.964.000	31.000
	Sub kegiatan: Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor	14.880.900	11.811.000	3.069.900
	Sub kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.500	19.999.200	300
	Sub kegiatan: Penyediaan Bahan/Material	14.992.000	14.976.675	15.325
	Sub kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	9.970.580	29.420
	Sub kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	151.000.000	107.615.030	43.384.970
	Sub kegiatan: Dukungan Pelaksanaan	20.000.000	19.838.500	161.500

	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah	24.881.000	24.881.000	-
	Sub kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.881.000	24.881.000	-

6.	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	807.729.538	727.643.008	80.086.530
	Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	-
	Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	174.864.000	127.422.878	47.441.122
	Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	630.365.538	597.720.130	32.645.408
7.	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.798.000	117.928.603	4.869.397
	Subkegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	87.800.000	82.979.253	4.820.747
	Subkegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	25.000.000	24.999.850	150
	Subkegiatan: Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	9.998.000	9.949.500	48.500

Keluaran/Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan, adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan terintegrasi
- Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKPJ, Waskat, Budaya Kerja dan Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
- Terwujudnya pelaksanaan program/kegiatan sesuai yang direncanakan
- Terpenuhinya kebutuhan gaji PNS
- Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik
- Tercapainya Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah
- Tersedianya Penyediaan Jasa dan Pengangkutan Beras dan Barang Dinas

- Terupdatenya informasi pelayanan publik
- Terwujudnya pengelolaan SPBE yang baik
- Tersedianya Pelayanan Administrasi Telepon, Air, Listrik, Internet dan Faksmile
- Terlaksananya penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Terpenuhinya kebutuhan Gaji Tenaga Honorer dan Pengelola Kegiatan Kantor
- Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Tabel 1.5

No.	UraianKegiatan	Pagu Anggaran(RP.)	Realisasi(Rp.)	Sisa(Rp.)
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	560.000.000	523.025.100	36.974.900
1.	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	250.000.000	218.765.100	31.234.900
	<i>Sub Kegiatan:</i> Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	250.000.000	218.765.100	31.234.900
2.	Pembutan Peta Potensi Investasi Provinsi	310.000.000	304.260.000	5.740.000
	<i>Sub Kegiatan:</i> Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	60.000.000	54.610.000	5.390.000
	<i>Sub Kegiatan:</i> Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	250.000.000	249.650.000	350.000
III.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	85.000.000	19.951.250	65.048.750
1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	85.000.000	19.951.250	65.048.750
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	65.000.000	-	65.000.000
	Sub Kegiatan: Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	20.000.000	19.951.250	48.750
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	387.154.470	324.997.855	62.156.615
1.	Penanaman Modal yang menurut ketentuan Peraturan Perundang - undangan menjadi Kewenangan Daerah	387.154.470	324.997.855	62.156.615

	Sub Kegiatan: Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko	24.908.470	24.718.410	190.060
	Sub Kegiatan: Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	80.446.000	77.661.650	2.784.350
	Sub Kegiatan: Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	281.800.000	222.617.795	59.182.205
IV.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.469.244.000	1.401.032.900	68.211.100
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.469.244.000	1.401.032.900	68.211.100
	Sub Kegiatan: Pengawasan Penanaman Modal	440.772.000	403.280.900	37.491.100
	Sub Kegiatan: Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	220.385.000	218.792.000	1.593.000
	Sub Kegiatan: Bimtek kepada Pelaku Usaha	808.087.000	778.960.000	29.127.000
V.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100.000.000	84.890.600	15.109.400
1.	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000	84.890.600	15.109.400
	Sub Kegiatan: Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000	84.890.600	15.109.400

1. **Sub Kegiatan :**

Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Keluaran :

Jumlah Peraturan Daerah Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan

penanaman modal;

Hasil :

Jumlah Laporan kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;

- Telah diterbitkan SK Tim Kerja Penyusun Perda Penanaman Modal oleh Sekda yang melibatkan Biro Hukum sebagai Penyusun, Kementerian Hukum dan Ham sebagai Tenaga Ahli dan DPMPTSP sebagai Sekretariat.
- Telah dilakukan Rapat Persiapan Panitia pada tanggal 28 Agustus 2024, yang menghasilkan Kesepakatan bahwa tenaga ahli harus lebih dari 2 orang, yang mengakibatkan adanya usulan perubahan anggaran, dan masih menunggu proses sampai saat ini.
- Telah dilaksanakan pengumpulan data untuk mendukung penyusunan Draf Perda Penanaman Modal.

2. **Sub Kegiatan :**

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah

Keluaran :

Jumlah Peraturan Daerah Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi

Hasil :

Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha provinsi

- Pengumpulan Dasar dasar Hukum
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD)
- Road Map/Peta Panduan
- Rencana Strategis (RENSTRA)

3. **Sub Kegiatan :**

Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi

Keluaran :

Jumlah dokumen peta potensi investasi provinsi

Hasil :

Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha provinsi

- Telah diterbitkan SK Penunjukan Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Swakelola Tenaga Ahli Penyusunan Peta Potensi Investasi.
- Telah dilakukan rapat persiapan tanggal 18 maret 2024 yang dihadiri oleh panitia
- Telah dilakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) oleh panitia
- Telah dilakukan rapat panitia tanggal 07 Mei 2024 di hotel on the rock yang melibatkan SKPD Teknis (semua sektor)
- Telah dilakukan FGD I tanggal 21 Juni 2024 di hotel on the rock yang mlibatkan SKPD Teknis (semua sektor)
- Telah dilakukan pengumpulan data untuk semua sektor
- Sesuai dengan schedule selanjutnya akan dilakukan FGD II terkait pelaporan penyampaian klarifikasi data, pembaharuan dan validasi data. Kegiatan belum terlaksana di karenakan masih menunggu pencairan dana DAK Tahap II
- Dari hasil Peta Digital Infografis dan desain aplikasi akan menghasilkan IPRO (*Investasi Proyek To Over* dan akan dipromosikan melalui aplikasi PIR (Potensi Investasi Regional)

4. **Sub Kegiatan :**

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Keluaran :

Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi;
Jumlah dokumen strategi promosi

Hasil :

Jumlah dokumen promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan promosi;

5. **Sub Kegiatan :**

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah

Keluaran :

Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi

Hasil :

Jumlah dokumen promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan promosi;
Buku Strategi Promosi Penanaman Modal;

6. **Sub Kegiatan :**

Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis

Risiko

Keluaran :

Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik;

Hasil :

Jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan;

7. **Sub Kegiatan :**

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Keluaran :

Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik;

Hasil :

Jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan;

8. **Sub Kegiatan :**

Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Keluaran :

Evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha;

Hasil :

Jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan;

9. **Sub Kegiatan :**

Pengawasan Penanaman Modal

Keluaran :

Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha;

Hasil :

Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dikendalikan;

Melakukan Pengawasan DAK sebanyak 45 Perusahaan dan Dekon 69 perusahaan;
 Realisasi Perusahaan Yang Telah Dilakukan Pengawasan (DAK-NON FISIK) hingga
 Bulan Desember Tahun 2024.

Tabel 1.6

BULAN	KABUPATEN/ KOTA	PERUSAHAAN	JUMLAH PERUSAHAAN
MARET	Manggarai Barat	PT. Prima Citra Pratama	7
		PT. Hotel Jayakarta Flores	
		L. Bajo Hotel	
		PT. Dtur Pesona Bajo	
		PT. Dtur Pesona Komodo	
		PT. Nuncalale Tridaya Prima	
		PT. Sentral Multikon Indi	
MEI	SIKKA	CV. Bengkunis Jaya	1
JUNI	SBD	PT. Sima Tentram Lestari	4
		PT. Cap Karoso Development	
		PT. Bumi Indah	
		PT. Graha Sukses Pratama	
	SUMBA TENGAH	PT. Adisti Indah	2
		PT. Shelly Indah Energi	
JULI	KOTA KUPANG	CV. Cristal Farma Merdeka	4
		CV. Pangan Sehat Sejahtera Merdeka	
		PT. Piet Mitra Jaya	
		PT. Safari Timor Sejahtera	
	MANGGARAI BARAT	PT. Pemandangan Taman Laut	9
		CV. Surya Agung	
		PT. deli point komodo	
		PT. good fellas bajo	
		PT. Kali Watu Residence	
		PT. Biru Indah Komodo	
		CV. Matahari Flores Indah	
		PT. Karya nusa mahardika	
		PT. Bumi propertindo sejahtera	
	MANGGARAI	PT. Hardi Sinergi (Sindha Hotel)	2
		PT. Menara Armada Pratama	
	TTS	Michael Carles Selan (Joan's Family Hotel),	4
		PT. Bayu Alam Sejahtera,	

		PT. Valentine Group	
		Hotel Bahagia Dua	
	Kab. Kupang	RS. Leona Kab. Kupang	1
Agustus			0
September	Kab. TTS	PT. Ciptalaku Lestari	3
		CV. Bintang Baru	
		PT. Nanda Karya Putra Pratama	
	Kab. TTU	1.PT. Ligua Plus	5
		2. PT. Griya Permai	
		3. CV. Tasanee	
		1. Hotel Livero	
		2. Jabalmart Supermarket	
	Kab. Belu	PT. Indomartco Prismatama	2
		PT. Sumber Alfaria Trijaya	
	Kab. Malaka	1. PT. Bahagia Timor Mandiri	2
		2. CV. Tumbes Karya	
Oktober	KOTA KUPANG	PT. Tranas Ice (Baskin Robbin)	12
		PT. Trans Coffe (Cofe Bean)	
		CV. Soliade Indah	
		PT. Transburger (Wendys)	
		CV. Usaha Timor Makmur	
		Klinik king care asia	
		CV. Sarana Prima Teknik Konsultan	
		PT. Batu Besi	
		PT. Putera Gemilang Karya Perkasa (Hotel Naka)	
		PT. Nanda Karya Putra Pratama	
		CV. Atmosphere	
	KAB.KUPANG	PT. Helong Persada makmur	4
		PT. Duta Pelita Permai	
		PT. Timor Hailuo Semen	
		PT Asri sejahtera bersama	
	TTS	Blessing Hotel	1
	TTU	PT. NAM	2
		PT. Multiguna Makmur	
	BELU	CV. Gaja Mada	6
		PT. Niaga Indoguna Yasa	
		Hotel Matahari	
		Kings Bakery Atamabua	
		CV. King Star	

		PT. Sinar Gemilang Trans	
	MALAKA	PT. Timor Mitra Niaga	4
		PT. Inti Daya Kencana	
		Hotel Nusa Dua Malaka	
		CV. Ellora	
	SBD	PT. Tourist Service	5
		PT. Arya Hospitality Mangement	
		PT. Escape Over Tanah Sumba	
		PT. Jaya Anoegrah Sentosa	
		PT. Talasi Tru Orogen	
	Sumba Barat	PT. Timor Mitra Niaga	6
		CV. Prima Sejati	
		Pt. Bumi Saudara Lestari	
		CV. Sinar Mentari Sumba,	
		CV. Prima Teknik dan	
		Efendi Subyanto/ Hotel Manandang	
	Rote Ndao	CV. Bauana Group	5
		Hotel New Ricky	
		Hotel Videsy	
PT. Sasando Properti			
PT. Freas			
November	Rote Ndao	PT. Timor Nusa Dirgantara	1
	Alor	PT. Pulau Alor Hotel	4
		PT. Janur Abadi Transport	
		PT. Giri Efata Mandiri Alor	
		PT. Anugrah Karya Agra Sentosa	
	Manggarai	1. PT. Titipan Tepat Ruteng	2
		2. PT. Panacea Elizabeth Jaya	
	Manggarai timur	PT. Borong Jaya Sejahtera	3
		Hotel Kasi Sayang (HKS)	
		PT. Panacea Elizaabeth Jaya	
TOTAL			100

Tabe; 1.7 Realisasi Perusahaan Yang Telah Dilakukan Pengawasan (Dekon) s/d Desember 2024

BULAN	KABUPATEN/ KOTA	PERUSAHAAN	JUMLAH PERUSAHAAN
APRIL	KOTA KUPANG	PT. Ciptalaku lestari	15

		PT. ICE MAJU BERSAMA	
		CV. SOLIADE INDAH	
		PT. KUPANG LEGI BAHARI	
		PT. DALEXTA	
		CV. BANGUN TIMOR PERDANA	
		PT. TRANS COFFEE	
		CV. DEBITOS	
		BASKIN ROBBINS	
		CV. ATMOSPHERE	
		PT. SAFARI TIMUR SEJAHTERA	
		PT. ENSEAL PUTERA MEGATRADING,tbk	
		PT. TRANS BURGER	
		RSUP BEN MBOI	
	KAB. KUPANG	PT. TOM	
JUNI	TTS	PT.EMEDICAL CENTER INDONESIA	5
	SUMBA BARAT	PT. Bumi Indah	
		PT. Sumba Nautil Resort	
	SUMBA BARAT DAYA	PT. Sima Tentram Lestari	
		PT. Cap Karoso Development	

JULI	KOTA KUPANG	CV. Berkat Mandiri	22
		CV. Hati suci	
	KAB. KUPANG	PT. Helong Persada Makmur	
		PT. Anugerah Timor Pratama	
		PT. Putra Timor Sentosa	
		PT. Pembangunan Sehat Sejahtera	
		PT. Aquamor	
		PT. Satelit Nusantara Tiga	
		PT. Sentosa Makmur Sejahtera Energi	
		PT. Rote Karaginan Nusantara	
		PT. Bumi Biru Sjahtera	
		TTS	
	PT Valentine Group dan		
	Michael Carles Selan (Joen's Family Hotel)		
	KAB. MANGGARAI BARAT	PT. Dtur Pesona Bajo	
		CV. Kurnia Manunggal	
		PT. Maju Bajo Sentosa	
		PT. Dtur Pesona Indonesia	
		PT. Komodo Kawisata Pratama	
		PT. Dtur Pesona Komodo	
		PT. Fortuna Paradiso Optima	
	KOTA KUPANG	PT. Vita Permai	

AGUSTUS	ROTE NDAO	PT. Enda Liu Rote /Hotel Rote Island	23
		PT. Asia Pasiic Rote	
		PT. Asia Pasiif Management	
		PT. Coco Matahari Nemberala	
		PT. Santic Sari Dewi/ Hotel Seed Resort	
	ALOR	PT. Timor Otsuki Mutiara (TOM)	
		PT. Cendana Indopearls Alor	
	KOTA KUPANG	PT.Kompas TV	
		CV. Perdana Mulia	
		PT. Safari Timor Sejahtera	
		PT. Karya Imanuel	
	TTS	Blessing Hotel	
		PT. Ciptalaku Lestari	
	TTU	CV. Sinar oematan	
		CV. Anugerah jaya	
		CV. Mega Asyera	
		CV. Berkat Timorens	
	BELU	CV. Neon Timur	
		CV. Daya Tata Mulia	
	NAGEKEO	PT. Cheetam lores Indonesia	
		Hotel Pepita	
	SUMBA TIMUR	PT. Muria Sumba Manis	
		PT.Aquamor Waikahingiru	
September	Malaka	Nusa Dua Hotel	5
	Kab. Kupang	CV. Unggas Timor Mandiri	
		PT. Bhakti Alam IndonesiaTimur	
		Aneka Komoditi Indonesia	
		Ryan Go Fangidae	
Oktober	Kab. Manggarai	PT. Transnusa Maritim Sejahtera	5
		PT. Floresco Aneka Indah	
	Kab. Alor	PT. Mitra Baru	
		Pt. Cendana Indopearl	
		PT. Alor Jaya	
TOTAL			75

10. **Sub Kegiatan :**

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

Keluaran :

Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dan merealisasikan kegiatan usahanya;

Hasil :

Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dikendalikan;

Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di 25 Perusahaan

Daftar Perusahaan PMA Dan PMDN Provinsi NTT yang telah difasilitasi Penyelesaian Masalah hingga bulan Desember Tahun 2024

Tabel 1.8

NO	LOKASI	BIDANG USAHA
1	Hotel Jayakarta Flores Kab. Manggarai Barat	Hotel
2	Hotel Ayana Kab. Manggarai Barat	Hotel
3	PT. Sentral Multikon Indi Kab. Manggarai Barat	Pertambangan
4	PT. Nuncalale Tridaya Prima Kab. Manggarai Barat	Pertambangan
5	PT. Bumi Propertindo Sejahtera Kab. Manggarai Barat	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
6	PT. Karya Nusa Mahardika Kab. Manggarai Barat	Hotel
7	PT. Timor Mitra Niaga Kab. Malaka	Perkebunan
8	PT. Inti Daya Kencana Kab. Malaka	Tambak Garam
9	CV. Jabalmart Rizky Atambua Kota Kupang	
10	CV. Atmosphere Kota Kupang	
11	PT. Pembangunan Sehat Sejahtera Kota Kupang	Perumahan
12	PT. Flobamor Kota Kupang	
13	CV. Kemilau Penuh Berkat	
14	PT. Trans Burger Kupang	
15	PT. Trans Ice Kupang	

16	CV. Unggas Timor Mandiri Kab. Kupang	Peternakan Ayam Petelur
17	PT. Tjakrawala Timur Sentosa Kab. Kupang	
18	PT. Pembangunan Sejahtera Kab. Kupang	Perumahan
19	PT. Sinar Mentari Sumba Kab. Sumba Barat	
20	CV. Prima Teknik Kab. Sumba Barat	
21	Hotel Manandang	
22	PT. Talasi Tru Origin Kab. Sumba Barat Daya	Perkebunan Jambu Mente
23	PT. Jaya Anoegrah Sentosa Kab. Sumba Barat Daya	
24	PT. Timor Mitra Niaga Kab. Malaka	
25	Hotel Nusa Dua Kab. Malaka	Hotel

11. **Sub Kegiatan :**

Bimtek kepada pelaku usaha

Keluaran :

Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis / sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko;

Hasil :

Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dikendalikan;

- Bimtek/sosialisasi di Kabupaten Manggarai Barat pada tangga; 1 sampai 4 bulan Mei 2024, jumlah peserta 160 orang pelaku Usaha
- Bimtek/Sosialisasi di Kabupaten Sumba Barat Daya diadakan pada tanggal 27 – 30 Juni 2024 dengan peserta 80 orang pelaku usaha
- Bimtek/Sosialisasi di Kota Kupang, diadakan tanggal 29 – 30 Juli 2024 dengan peserta 152 orang
- Bimtek/Sosialisasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan diadakan mulai dari tanggal 25 – 27 Agustus 2024 dengan jumlah peserta 100 orang pelaku usaha
- Bimtek/Sosialisasi di Kota Kupang, diadakan tanggal 25 – 26 Juli 2024 dengan peserta 152 orang

- Bimtek/Sosialisasi di Kota Kupang, diadakan tanggal 28 – 29 Juli 2024 dengan peserta 152 orang

Tabel 1.9 Rekapitan Bimtek Tahun 2024 :

TAHAP	KAB/KOTA	BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)/SOSIALISASI IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN PENGAWASAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO	BIMTEK LKPM	JUMLAH (Pelaku usaha)
1	Manggarai Barat	80	80	160
2	Sumba Barat Daya	40	40	80
3	Kota Kupang	76	76	152
4	TTS	50	50	100
5	Kota Kupang	76	76	152
6	Kota Kupang	76	76	152
TOTAL		246	246	796

12. Sub Kegiatan :

Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Keluaran :

Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan;

Hasil :

Jumlah perizinan dan non perizinan yang sudah terintegrasi secara digital;

2.2 APBN (DEKONSENTRASI - DIPA)

Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, mendapat dukungan alokasi dana APBN melalui anggaran Dekonsentrasi, yaitu : a) DIPA BKPM RI : Pagu anggaran Rp. 413.770.000 dengan Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal; Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: Pengawasan dan pemantauan PMA dan PMDN ke Kabupaten/Kota. Realisasi s/d 31 Desember 2024 : Rp. 411.385.841 (99,42%) dan sisa anggaran : Rp. 2.384.159 (0,58%). Outputnya : Laporan pengawasan di Kota Kupang, SBD, Sumba Barat, TTS, Mabar, Rote Ndao, Alor, Nagekeo, TTU, Belu, Sumba Timur, Malaka, Sumba Tengah, Sikka, Sumba Barat, Rote Ndao dan Kabupaten Kupang,

ada 75 Perusahaan. b) DIPA Kementerian Dalam Negeri Pagu anggaran Rp. 161.305.000; Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa; Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah : Penerapan PTSP Prima di Daerah (Kab/Kota). Evaluasi kinerja penyelenggaraan PTSP dan pemringkatan 5 (lima) besar PTSP Kabupaten/Kota. Realisasi s/d 31 Desember 2024 : Rp. 161.247.380 (99,96%), Sisa Rp. 57.620 (0,04%). Outputnya : Laporan hasil monev dan pembinaan terhadap 9 (sembilan) Kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Belu, Alor, Ende, Rote Ndao dan Kabupaten TTS. 35 Total Dana Dekonsentrasi Tahun 2024 : Rp. 575.075.000, realisasi s/d 31 Desember 2024 : Rp. 572.633.221 (99,57%). Sisa anggaran : Rp. 2.441.779 (0,43%).

2.3. PROGRAM/KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PERIODE 25 SEPTEMBER SAMPAI DENGAN 25 DESEMBER 2024

- 1) Penyelesaian Penyusunan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi:
 - a. Sinkronisasi dengan Tim Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi NTT;
 - b. Sinkronisasi dengan Bapemperda DPRD Provinsi NTT;
 - c. Harmonisasi dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi NTT;
 - d. Konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Penyelesaian Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi (Potensi Investasi Regional);
- 3) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko kepada pelaku usaha;
- 4) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Pelaporan LKPM kepada pelaku usaha;
- 5) Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha di Kabupaten/Kota, diantaranya di Kabupaten Manggarai Barat;
- 6) Melakukan pengawasan kegiatan penanaman modal di Kabupaten/Kota;
- 7) Kerjasama penyelenggaraan Bimtek Aplikasi SICANTIK CLOUD (Implementasi pelayanan perizinan secara elektronik dengan Aplikasi SICANTIK CLOUD) dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Pelaksanaan kegiatan Migrasi Izin Manual ke Elektronik dengan menggunakan

Aplikasi SICANTIK CLOUD (Implementasi pelayanan perizinan secara elektronik dengan Aplikasi SICANTIK CLOUD);

- 9) Implementasi pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik melalui OSS RBA selama periode 01 Oktober – 31 Desember 2024 (data realtime OSS) 4.576 NIB yang diterbitkan, terdiri dari PMA :
 - a. PMA 6 NIB dan PMDN : 4.570 NIB,
 - b. UMK 4.553 dan Non UMK 23;
 - c. 3.742 persyaratan dasar,
 - d. 1.088 sertifikat standar,
 - e. 221 UMKU dan
 - f. 66 izin yang diterbitkan;
- 10) Pelayanan perizinan secara manual melalui Front Office pada DPMPTSP Provinsi NTT, jumlah izin yang diterbitkan untuk periode 01 Oktober – 31 Desember 2024 adalah 998 izin yang diterbitkan;
- 11) Penyusunan Revisi Standar Pelayanan (SP) untuk pelayanan perizinan dan non perizinan; 12) Mengikuti berbagai rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah;
- 12) Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dan Renja Murni Tahun 2025;
- 13) Penyelenggaraan anggaran, pagu anggaran perubahan (DPPA) Tahun 2024 : Rp. 9.615.756.908, realisasi sampai dengan 31 Desember 2024: Rp. 8.752.432.048 (91,02%), sisa anggaran Rp. 1.505.158.860 (8,98%). Sisa anggaran yang paling banyak adalah dari Belanja Gaji dan Tunjangan PNS : Rp. 1.100.433.839 (73,11%), sisanya dari beberapa kegiatan rutin dan program/kegiatan urusan wajib, yang masih ada sisa anggaran;
- 14) Menerima penghargaan berupa Piagam Penghargaan dan Piala Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi NTT sebagai Perangkat Daerah dengan Kategori Sangat Informatif;
- 15) Menerima piagam penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT, terkait Kepatuhan Pelayanan Publik yang terbaik di Provinsi NTT;
- 16) Penerapan tanda tangan elektronik secara penuh melalui SRIKANDI untuk surat menyurat dan penerbitan dokumen perizinan (Sistem OSS RBA, SICANTIK CLOUD).

2.4 Perkembangan Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan Di Provinsi NTT Tahun 2024

a. Target dan Realisasi Investasi

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Provinsi Kepulauan dengan kondisi geografis dan topografis serta iklim yang sangat ekstrim membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk akselerasi pembangunan terutama pembangunan ekonomi dan infrastruktur penunjang lainnya. Untuk membangun wilayah Nusa Tenggara Timur tidak cukup dengan hanya mengandalkan pembiayaan dari Pemerintah melalui APBN dan APBD saja tentunya membutuhkan peran serta swasta melalui kegiatan investasi (asing maupun dalam negeri). Dengan adanya investasi/penanaman modal (asing dan dalam negeri) diharapkan dapat memberikan Multiplier Effect bagi penciptaan lapangan pekerjaan baru, mengurangi angka pengangguran dengan adanya penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak terutama penggunaan tenaga kerja lokal oleh perusahaan PMA dan PMDN serta peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat lokal di sekitar lokasi investasi . Sehingga pada gilirannya secara kumulatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara lokal, regional dan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bapak Presiden dalam setiap arahan selalu menyampaikan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Daerah ada 2 (dua) sektor strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu : Sektor Perdagangan (Ekspor) dan Investasi (Hilirisasi). Melalui pemberian kemudahan berinvestasi dan percepatan pelayanan perizinan kepada masyarakat, secara tidak langsung berdampak pada kegiatan usaha masyarakat, peningkatan pendapatan pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi yang dipungut oleh Perangkat Daerah Teknis. Sehingga pola penganggaran ke depan diharapkan memperhatikan program dan kegiatan dukungan peningkatan investasi untuk menarik minat para investor untuk berinvestasi di Provinsi NTT. Secara Nasional, Pemerintah Pusat melalui BKPM RI / Kementerian Investasi menetapkan Target Realisasi Investasi untuk masing-masing Provinsi se Indonesia, sesuai potensi (yang menyatakan minat dan proses perizinan) dan kondisi eksisting perusahaan PMA dan PMDN yang ada pada masing-masing Provinsi. Untuk Provinsi NTT secara Nasional diberikan target, yaitu Tahun 2018 : Rp. 6,36 Triliun, Tahun 2019 : Rp. 7 Triliun, Tahun 2020 : Rp. 4,48 Triliun, Tahun 2021 : Rp. 7,3 Triliun, Tahun 2022 : Rp. 6,95 Triliun dan Tahun 2023 : Rp. 5,31 Triliun dan Tahun 2024 : Rp. 6,26 Triliun Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci

RPJMD untuk Urusan Penanaman Modal : Indikatornya adalah Realisasi Nilai Investasi (PMA dan PMDN) ditargetkan setiap tahunnya yang harus dicapai adalah : Tahun 2019 : Rp. 5 Triliun; 2020 : Rp. 5,5 Triliun; 2021 : Rp. 5,7 Triliun; 2022 : Rp. 5,9 Triliun; 2023 : Rp. 6,2 Triliun dan tahun 2024 : Rp. 5,7 Triliun. Data Target dan Realisasi Investasi (Secara Nasional dan RPJMD) Tahun 2018 – 2024 , adalah sebagaimana pada Tabel 1.10 berikut :

Tabel 1.10

Tahun	Target Nasional Untuk Provinsi NTT	Target RPJMD/ RPD 2018- 2024	Realisasi Setiap Tahun		Total (Rp.)
			PMA (Rp.)	PMDN (Rp.)	
2018	Rp. 6,36 Triliun	Rp. 4 Triliun	1.975.537.295.683	4.261.314.603.725	6.236.851.899.408
2019	Rp. 7 Triliun	Rp. 5 Triliun	3.112.936.086.170	4.119.056.530.702	7.231.992.616.872
2020	Rp. 4,43 Triliun	Rp. 5,5 Triliun	381.482.906.001	3.910.571.670.659	4.292.054.576.660
2021	Rp. 7,3 Triliun	Rp. 5,7 Triliun	1.533.881.741.924	4.215.286.509.072	5.749.168.250.996
2022	Rp. 6,95 Triliun	Rp. 5,9 Triliun	1.053.290.000.000	4.070.850.000.000	5.124.140.000.000
2023	Rp. 5,31 Triliun	Rp. 6,2 Triliun	1.839.640.000.000	3.407.200.000.000	5.246.840.000.000
2024	Rp. 6,26 Triliun	Rp. 5,7 Triliun	1.592.494.000.000	2.625.538.900.000	4.218.037.900.000 (67,38%)

Perkembangan realisasi investasi di Provinsi NTT tahun 2018 s/d 2023 setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan (berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal). Rata-rata peningkatan atau penambahan nilai realisasi investasi di Provinsi NTT periode tahun 2018 – 2023 mencapai 1,45%. Tahun 2024 secara Nasional Target Realisasi Investasi Untuk Provinsi NTT sebesar Rp 6.260.000.000.000, dengan Realisasi Investasi Triwulan I Rp 976.074.800.000. atau sebesar 15,60 % dengan rincian sebagai berikut: Realisasi PMDN senilai Rp. 529.512.800.000 (14,10%) dari target Rp. 3.756.000.000.000; Realisasi PMA senilai Rp. 446.562.000.000 (17,83%) dari target Rp. 2.504.000.000.000. Realisasi Triwulan II Tahun 2024 Rp. 815.688.900.000,- atau sebesar 13,03 % dengan Rincian PMDN Rp. 516.870.900.000,- (13,76%) & PMA Rp. 298.818.000.000,- (11,93%). Realisasi Triwulan III Tahun 2024 Rp. 1.259.174.200.000,- atau sebesar 20,11 % dengan Rincian PMDN Rp. 656.555.900.000,- (17,48%) & PMA Rp. 602.519.000.000,- (24,07%). Realisasi Triwulan IV Rp. 2.167.100.000.000 dengan rincian PMDN Rp. 922.600.000.000 dan PMA Rp. 244.500.000.000 Jadi realisasi investasi Triwulan IV, yaitu Rp. 1.167.100.000.000 (18,64%), sehingga Total Realisasi Investasi Triwulan I s/d IV Tahun 2024 sebesar Rp. 4.218.037.900.000 atau sebesar 67,38% dengan realisasi PMDN Rp. 2.625.538.900.000 (69,90%) dan PMA 1.592.494.000.000 (63,60%) dengan jumlah

proyek/kegiatan investasi 5.747 proyek, terdiri dari PMA : 1.102 proyek/kegiatan investasi dan PMDN : 4.645 proyek/kegiatan investasi.

b. Perkembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Sesuai amanat PP Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko mengkategorikan semua jenis kegiatan usaha dalam 4 (empat) kelompok, yaitu : kegiatan usaha beresiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan kegiatan usaha beresiko tinggi). Untuk yang beresiko rendah (cukup dengan Nomor Induk Berusaha/NIB), resiko menengah rendah (NIB & Sertifikat Standar/SS berupa pernyataan mandiri), resiko menengah tinggi (NIB & Sertifikat Standar/SS yang diverifikasi) dan usaha yang resiko tinggi (NIB & Izin). Dari aspek modal usaha, yaitu Usaha Mikro (di bawah Rp. 1 Miliyad), Usaha Kecil (di atas Rp. 1 M - 5 M) , Usaha Menengah (Rp. 5 M – 10 M) dan Usaha Besar (di atas R. 10 Miliyad. Untuk implementasinya Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan Pergub Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. Dalam Pergub Nomor 127 Tahun 2022, jenis perizinan berusaha dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu : 23 a) Perizinan Berusaha Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), ada 11 Sektor dan 759 jenis usaha yang terdiri dari ber KBLI : 744 jenis usaha dan PB-UMKU : ada 15 jenis usaha; b) Perizinan Berusaha Non KBLI, ada 8 Sektor dan 24 jenis usaha; c) Perizinan Non Berusaha dan Non KBLI : ada 4 Sektor dan 8 jenis usaha; d) Non Perizinan : ada 8 Sektor dan 24 jenis usaha. Untuk proses pelayanan perizinan menggunakan 2 (system), yaitu pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis resiko melalui System Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) dan non elektronik /manual lebih banyak izin penelitian dan yang non perizinan. Pada tahun 2022 dilakukan revisi terhadap Pergub Nomor 37 Tahun 2021 dengan Pergub Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan, dimana semua jenis perizinan di kelompokkan dalam 4 (empat) kategori sesuai tingkatan resiko pelaksanaan kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha beresiko rendah, menengah rendah, resiko menengah rendah dan kegiatan usaha beresiko tinggi (amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko). Ada 787 jenis perizinan dan 24 jenis non perizinan yang didelegasikan kepada DPMPTP Provinsi NTT. Data

perizinan berusaha menurut sektor Tahun 2024 di Provinsi NTT sebagaimana pada Tabel 1.11 berikut ini.

Tabel 1.11

No.	Sektor	Jumlah Izin	Jumlah SOP/NSPK
A.	Perizinan Berusaha Sesuai KBLI & PB-UMKU	759 Jenis Perizinan	759
1.	Sektor Kesehatan	9 (sembilan) Jenis izin	9
2.	Sektor Perhubungan	30 (tigapuluh) jenis perizinan	30
3.	Sektor Pertanian	24 (dua puluh tiga) jenis perizinan	24
4.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	31 (tiga puluh satu) jenis perizinan	
5.	Sektor Kelautan dan Perikanan	77 (tujuh puluh tiga) jenis perizinan	77
6.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	43 (empat puluh tiga) jenis perizinan	43
7.	Sektor Pariwisata	24 (dua puluh empat) jenis perizinan	24
8.	Sektor Perdagangan	1 (Satu) jenis perizinan	1
9.	Sektor Ketenagakerjaan	2 (dua) jenis perizinan	2
10.	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2 (dua) jenis perizinan	2
11.	Sektor Perindustrian	513 (limaratus tigabelas) jenis perizinan	513
B.	Perizinan Berusaha Non KBLI	24 Jenis Perizinan	
1.	Sektor Sosial	1 (Satu) jenis perizinan	1
2.	Sektor Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 (Satu) jenis perizinan	1
3.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	2 (dua) jenis perizinan	2
4.	Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 (satu) jenis perizinan	1
5.	Sektor Peternakan	8 (delapan) jenis perizinan	8
6.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4 (empat) jenis perizinan	4
7.	Sektor Perdagangan	1 (satu) jenis perizinan	1
8.	Sektor ESDM	6 (enam) jenis perizinan	6
C.	Perizinan Non Berusaha Non KBLI	8 Jenis Perizinan	
1.	Sosial	2 (dua) jenis perizinan	2
2.	Pendidikan dan Kebudayaan	2 (dua) jenis perizinan	2
3.	Peternakan	1 (satu) jenis perizinan	1

4.	Kesbangpol	3(tiga) jenis perizinan	3
D.	NonPerizinan	24 Jenis Perizinan	
1.	SektorKesehatan	2(dua) jenis non perizinan	2
2.	SektorPerhubungan	3(tiga) jenis non perizinan	3
3.	SektorKetenagakerjaan	2(dua) jenis non perizinan	2
4.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	1(satu) jenis non perizinan	1
5.	SektorPeternakan	3(tiga) jenis non perizinan	3
6.	SektorLingkunganHidup danKehutanan	9 (sembilan) jenis non perizinan	9
7.	SektorPerdagangan	2(dua) jenis non perizinan	2
8.	SektorKesbangpol	2(dua) jenis non perizinan	2
	Total	791 Jenis Perizinan & 24 NonPerizinan	815

Dari 815 jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan ke DPMPTSP Provinsi NTT ada 54 jenis perizinan dan non perizinan yang masih diterbitkan secara manual atau 6,63%, terdiri dari 31 jenis perizinan dan 23 non perizinan. Perizinan yang diterbitkan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dari jumlah perizinan yang diterbitkan, rata-rata peningkatan realisasi penerbitan izin dari tahun 2020 – 2023 adalah 9,25%. Secara tren realisasi penerbitan izin setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2020 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 3.500 izin realisasi sebanyak 4.868 izin yang diterbitkan atau 139,09 % dan tahun 2021 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 4.000 izin, realisasi jumlah izin yang diterbitkan mencapai 5.667 izin (113,34%) dan tahun 2022 target jumlah izin yang diterbitkan 5.000 izin, realisasi jumlah izin yang diterbitkan s/d Bulan Desember mencapai 6.626 izin atau 132,52%, melampaui target. Pada tahun 2023 jumlah izin yang diterbitkan secara melalui front office s/d 31 Desember 2023 sebanyak 7.703 izin (154,06%), dari target tahun 2023 sebanyak 5.000 izin yang diterbitkan. Capaiannya 154,06 %, Rata –rata 1 bulan ± 642 izin yang diterbitkan, rata-rata per hari (22 hari kerja) ± 29 izin yang diterbitkan.

Tahun 2024 target jumlah izin yang diterbitkan melalui front office DPMPTSP Provinsi NTT sebanyak 5.000 izin. Jumlah izin yang diterbitkan Januari – Desember 2024 sudah mencapai 5.373 izin atau 107,46%. Rata –rata 1 bulan ± 448 izin yang diterbitkan, rata-rata per hari (22 hari kerja) ± 20 izin

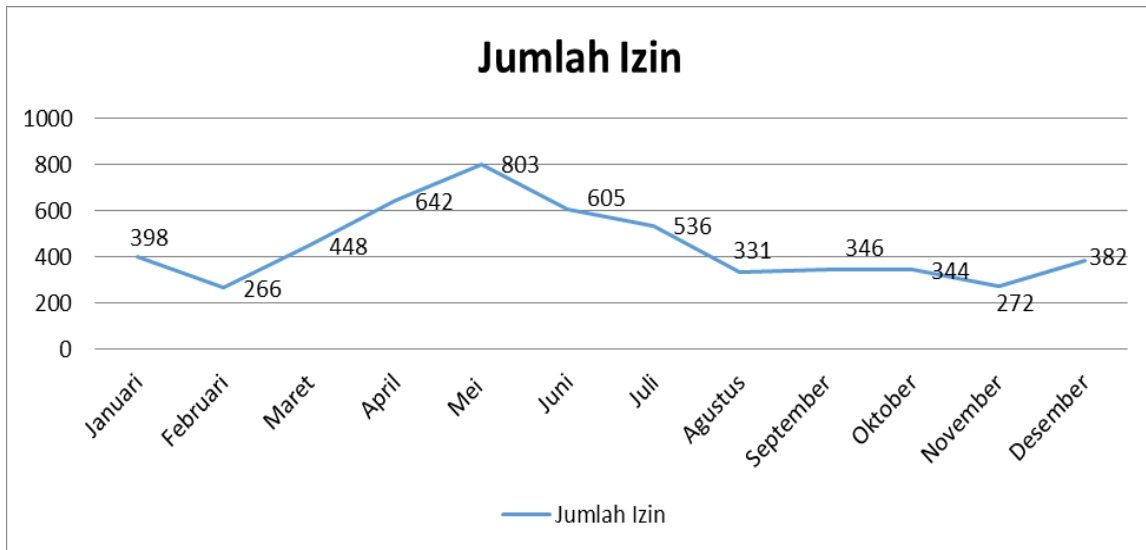
yang diterbitkan. Data perkembangan jumlah izin yang diterbitkan tahun 2018 – 2024 yang diterbitkan melalui Front Office pada DPMPTSP Provinsi NTT, adalah sebagaimana pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 1.12

Data Perkembangan Jumlah Izin Yang Diterbitkan Melalui Front Office
pada DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2018 – 2024

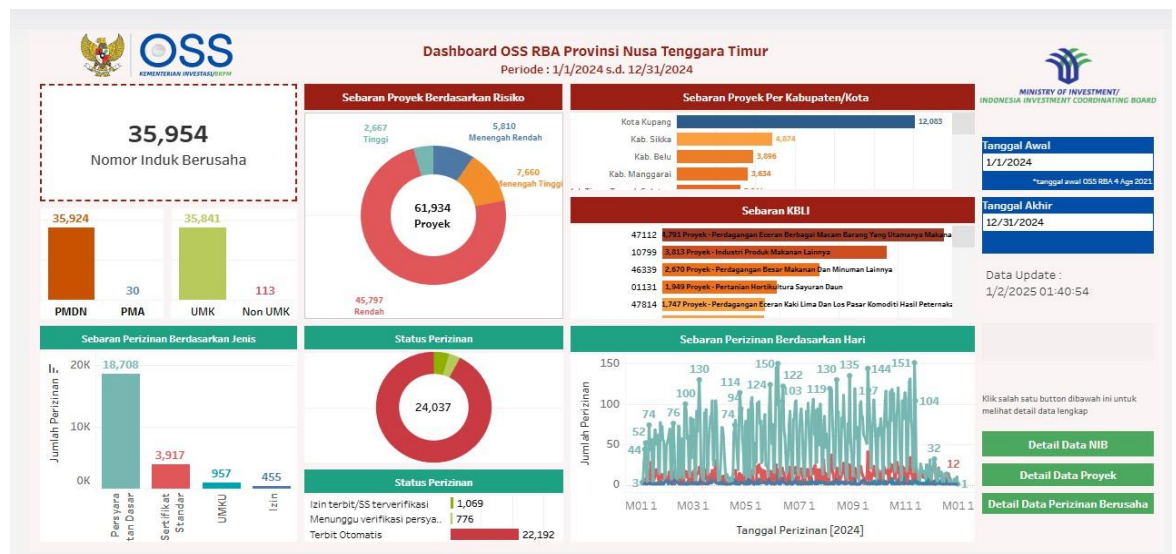
NO.	BIDANG PERIZINAN	JENIS IZIN		JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN						
		IZIN	NON IZIN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	KESBANGPOL	3	2	4.729	3.806	3.227	3.974	4.840	5.323	4.060
2.	PETERNAKAN	9	3	870	770	572	780	833	1.325	1.033
3.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	77	-	840	653	678	436	581	726	74
4.	PERTANIAN & PERKEBUNAN	24	-	4	9	3	29	10	15	6
5.	KESEHATAN	9	2	18	10	13	17	4	-	-
6.	TENAGA KERJA & KOPERASI	3	2	73	42	17	5	21	9	-
7.	PERHUBUNGAN	30	3	62	73	93	101	80	105	69
8.	PERINDAG	515	2	6	4	4	1	14	5	1
9.	PARIWISATA & EKONOMI KREATIF	25	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT	2	-	-	-	-	-	2	-	-
11.	KEHUTANAN & LH	35	9	94	47	69	72	49	54	61
12.	SOSIAL	3	-	6	1	4	-	8	4	4
13.	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	49	-	118	156	154	41	80	26	2
14.	PENANAMAN MODAL	-	-	3	-	-	-	-	-	-
15.	PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	4	1	-	-	94	206	104	111	63
	Jumlah	791	24	6.823	5.571	4.868	5.667	6.626	7.703	5.373

Jumlah izin yang diterbitkan untuk periode 01 Oktober – 31 Desember 2024 adalah 998 izin yang diterbitkan. Data jumlah izin yang diterbitkan periode Januari – Desember Tahun 2024 (Proses Penerbitan Izin Melalui Front Office DPMPTSP Provinsi NTT, pemohon datang langsung ke kantor) , adalah sebagaimana pada Gambar 1.5 berikut ini.

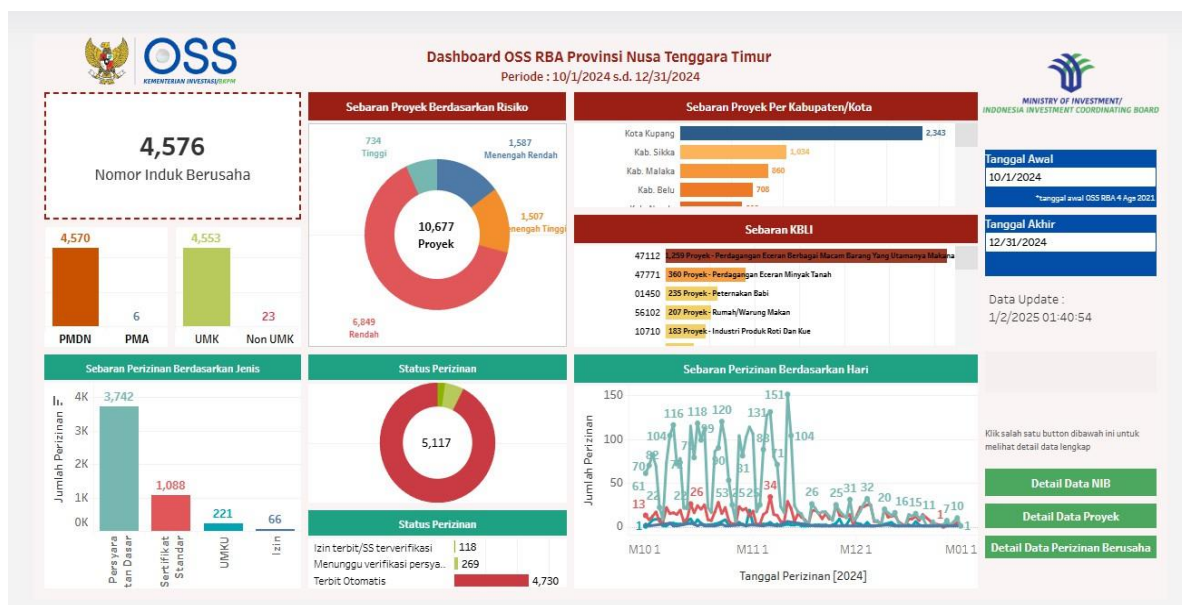


Proses penerbitan izin yang dilakukan secara online dan terintegrasi dari pusat sampai ke daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui Sistem Pelayanan Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA). Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan berusaha berbasis resiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Sertifikat Standar (SS) adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelayanan kegiatan usaha. Izin adalah Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Pelaksanaan penerapan Aplikasi Online Single Submission (OSS) – Risk Based Approach (RBA), di Lounching sejak tanggal 4 Agustus 2021, dari OSS Versi 1.1, dan digunakan oleh seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam hal ini oleh Perangkat Daerah DPMPTSP yang ada. Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara keseluruhan untuk Provinsi NTT Tahun 2024 periode 01 Januari – 31 Desember 2024 (Realtime OSS) sebanyak 35.954 NIB, terdiri dari PMA : 30 NIB, PMDN : 35.924 NIB (ada 35.841 UMK dan 113 Non UMK) dan Jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 455 izin, ada 3.917 Sertifikat Standar serta 18.708 persyaratan

dasar yang diterbitkan. Data realtime jumlah izin yang diterbitkan dari Januari – Desember 2024, sebagaimana pada Gambar 1.6 berikut.



Untuk periode 01 Oktober – 31 Desember 2024 (data realtime OSS) ada 4.576 NIB yang diterbitkan, terdiri dari PMA : 6 NIB dan PMDN : 4.570 NIB, ada 4.553 UMK dan 23 Non UMK; 3.742 persyaratan dasar, 1.088 sertifikat standar, 221 UMKU dan ada 66 izin yang diterbitkan. Data realtime penerbitan dokumen NIB, Sertifikat Standard dan Dokumen Izin melalui Sistem OSS – RBA di Provinsi NTT Tahun 2024 (01 Oktober s/d 31 Desember), yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi NTT adalah sebagaimana pada Gambar 1.7 berikut ini.



SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT Setiap Triwulan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan, dengan metode yaitu secara online melalui HP Android dengan menscan barcode yang ada serta melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang mengurus izin, kemudian mereka memberikan penilaian terhadap 9 (sembilan) aspek, yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana pelayanan, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan. Hasil survey ini dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil survey dan penilaian langsung masyarakat, terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan khusus untuk tahun 2023 adalah : Hasil Survey IKM TW I : 91.25; IKM TW II : 91,50 TW III : 92,1, dan hasil survey triwulan IV : 95 (sangat memuaskan), jadi capaian kinerjanya : 102,15%, di atas target yang ditetapkan, artinya senantiasa dilakukan pembenahan dan perbaikan pelaksanaan pelayanan. Hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2024 adalah Hasil survey Triwulan I: 93,37. TW II : 91,31 dan TW III : 92,53. Jadi capaian kinerjanya mencapai 97,4%.

BAB III

HAL – HAL YANG MASIH PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTT

- A. Pemerintahan Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT ada beberapa hal yang belum dipenuhi sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik sesuai ketentuan standar pelayanan minimal, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.17

NO	STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL	KONDISI SAAT INI & RENCANA
I.	SARANA & PRASARANA:	
1.	Ketersediaan ruangan pelayanan (Front Office dan BackOffice) secara umum sudah ada	Ketersediaan toilet khusus untuk kelompok difabel belum ada; termasuk fasilitas penunjang untuk kelompok rentan.
2.	Sarana dan prasarana fasilitas penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah ada	Kondisinya perlu dilakukan pemeliharaan dan pengadaan baru (sudah ada anggaran 2025 untuk pengadaan computer, printer khusus untuk menunjang pelayanan di PTSP)
3.	Kebersihan Lingkungan Kantor	Masih belum optimal, agar kedepannya menjadi perhatian serius terkait kebersihan lingkungan kantor
II	SUMBER DAYA MANUSIA	
1.	Proses impasing untuk pengisian jabatan fungsional ahli muda dan ahli pertama pada Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dan Fungsional Penata Perizinan	Sementara proses di BKD, untuk Fungsional Penata Perizinan sesuai surat dari Instansi Pembina (Kemendagri) harus segera dilakukan pelantikan yang sudah disetujui oleh BKN dan Kemendagri)
2.	Proses Pengangkatan P3K	Untuk tahap pertama sudah mengikuti ujian menunggu pengumuman sedangkan tahap kedua sementara berproses
III	INOVASI & REFORMASI BIROKRASI	
1.	Pemerintah Daerah melakukan inovasi untuk meningkatkan penyelenggaraan PTSP.	Untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal sudah ada, OSS RBA dan SICANTIK CLOUD
2.	Untuk pelayanan perizinan yang masih manual saat ini ada kurang lebih 54	Saat ini sudah secara bertahap menggunakan Aplikasi SICANTIK

NO	STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL	KONDISI SAAT INI & RENCANA
	Jenis perizinan dan non perizinan	CLOUD yang sudah berjalan baru Izin Penelitian. Secara bertahap agar yang lain yang masih sisa dapat menggunakan SICANTIK CLOUD sehingga tidak ada lagi izin yang diterbitkan secara manual
3.	Potensi Investasi Regional (PIR)	Sudah disusun peta dan peluang investasi dan pengisian data dalam Sistem PIR, agar diupdate
IV	WAKTU (DURASI PENERBITAN IZIN)	
1.	Jangka waktu pelayanan perizinan dan non perizinan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Dokumen Perizinan dan Non Perizinan secara lengkap dan benar.	Ada beberapa jenis perizinan yang diatas 5 (lima) hari karena masih menunggu Rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah Teknis
2.	Sudah dilakukan Revisi Standar Pelayanan (menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru)	Saat ini sudah pada tahap akhir yaitu penyesuaian kembali Draft SP yang ada sesuai masukan pada kegiatan konsultasi publik/uji publik, sebelum ditetapkan dan diterapkan.

A. Program/Kegiatan Mendesak

No	Kegiatan	Capaian
1.	Penunjukan pengelolaan keuangan (APBD dan APBN).	Sudah diusulkan
2.	Finalisasi Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	Penyesuaian beberapa item sesuai masukan dari Kemendagri
3.	Finalisasi Penyusunan Reviu Standar Pelayanan (SP)	Sementara proses finalisasi dan penyesuaian terakhir
4.	Persiapan pengadaan barang jasa (kegiatan pihak ketiga) untuk tahun anggaran 2025 (termasuk penunjukan personil)	Belum diproses
5.	Finalisasi Penggunaan Aplikasi SICANTIK CLOUD	Untuk jenis perizinan yang belum dimasukan/diinput dalam Aplikasi SICANTIK CLOUD, sementara berproses termasuk menunggu Standar Pelayanan.
6.	Persiapan administrasi untuk Pelantikan Pejabat Fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama untuk Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dan Fungsional Penata Perizinan	Sementara proses pemenuhan kelengkapan berkas di BKD (untuk yang penata perizinan)
7.	Penyusunan LPPD, LKPJ, LKIP dan Laporan Akhir Tahun 2024	Sementara disusun oleh parapetugas sesuai penugasan

No	Kegiatan	Capaian
8.	Pembagian Tugas dan Peran pada masing-masing pegawai untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2025	Belum berproses menunggu penetapan DPA Tahun 2025
9.	Persiapan Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2026, sesuai surat edaran Sekda	Sementara proses penyusunan Draft awal
10.	Komunikasi dengan pelaku usaha sesuai penugasan untuk masing-masing staf di Substansi Penanaman Modal untuk finalisasi data realisasi investasi Triwulan IV dan Realisasi Investasi Tahun 2024 untuk Provinsi NTT	Sementara proses sesuai penugasan penanganan masing-masing kabupaten/kota
11.	Persiapan penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Daerah	Anggaran sudah disiapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2025 DPMPTSP Provinsi NTT

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

07. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan:

Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA - PERJANJIAN KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi dan Jumlah Investor	Penambahan Nilai Realisasi Investasi	Rp.6,26 Triliun	s/d TW IV, Rp. 4.218.037.900.000 67,38%	Meningnya jumlah investor, jmlh proyek / keg 5.747 proyek, PMA 1.102 proyek/keg, PMDN 4.645 proyek/keg dan total penyerapan tenaga kerja 5.099 org	Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	Mewujudkan Masyarakat sejahtera, mandiri, dan adil.
		Persentase laju pertumbuhan PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun (Target PMA : Rp. 2.504.000.000.000 atau 40% dan Target PMDN : Rp. 3.756.000.000.000 atau 60%)	100 % (PMA: 40% dan PMDN : 60%)	67,36% (PMA Rp. 1.592.494.000.000 63,60% & PMDN: Rp. 2.625.538.900.000 70,02%			
2.	Terwujudnya Kepuasan Layanan Perizinan dan	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP (Target 5.000 izin yang diterbitkan)	100 % 5.000	107,46% 5.373	Meningkatnya jumlah izin yang diterbitkan		

	Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	94,83	
		Realisasi Belanja Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	90%	91,22%	101,36%
		Realisasi 5 Program Urusan Wajib	90%	90,49%	100,54%
		Realisasi Dana Dekonsentrasi (2 Satker)	90%	99,57%	110,63%
		Belanja pengadaan barang perangkat daerah menggunakan aplikasi e-purchasing	Aplikasi	Aplikasi	100%
		Penyampaian LKPD, LKPJ dan LKIP Paling lambat 28 Februari 2023	12 Februari 2024	12 Februari 2025	100%
		Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (> 70-80)	80	81,51	105,64
		Nilai PMPRB Minimal A (> 80 – 90)	90	-	-
		Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%	Baik	96,09%	100
		Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP :	-	-	-
		a. TL temuan tahun 2024 : Administrasi 100%, Keuangan 80%.	100% & 80%	-	Blm ada datanya
		b. TL temuan di bawah tahun 2022 ; administrasi 100%, Keuangan 80%	100% & 80%	100%	100%
		Jumlah inovasi perangkat daerah minimal 5 (lima) dan yang diusul pada pelaksanaan kompetisi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/LSM minimal 2 inovasi	5 Inovasi & 2 inovasi	5 Inovasi & 1 inovasi Grab picel, sijempol, sicanik cloud, Kilin Pedal dan PKS	100%
		Pengelolaan tata naskah dinas dan penerapan tanda tangan elektronik melalui aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2024	80 %	100 %	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik /Minimal Kategori Baik (76,61 – 88,30)	88,30	95	107,59%
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (75)	89,99	Informatif 93,01	103,36%
		Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra / NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah	2	2	100%

3.1.1 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.					-
	2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Input: Rp. 560.000.000	Input: Rp. 523.025.100 (93,39%)	Realisasi Investasi TW I : Rp. 976.074.977.806 (16,97%), Triwulan II : Rp. 815.688.900.000. , Triwulan III : Rp. 1.259.174.200.000. Triwulan IV : Rp. 1.167.100.000.000 Jadi total realisasi investasi s/d TW IV : Rp.4.218.037.900.000 (67,36%), jadi tidak mencapai target 75%. (data sementara)	
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.	Output: •Jumlah Peraturan Daerah Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal; •Outcome: Jumlah Laporan kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;	Output: • Jumlah Peraturan Daerah Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal; •Outcome: Jumlah Laporan kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;		
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Output: •Jumlah Peraturan Daerah Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi •Outcome : Jumlah Peraturan Daerah (Perda) RUPM Daerah Provinsi	Output: •Jumlah Peraturab Daerah Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi •Outcome : Jumlah Peraturan Daerah (Perda) RUPM Daerah Provinsi		
	5. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Output : •Jumlah dokumen peta potensi investasi provinsi Outcome : Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha provinsi	Output : • Jumlah dokumen peta potensi investasi provinsi Outcome : Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha provinsi		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Program Promosi Penanaman Modal	Input: Rp. 85.000.000	Input: Rp. 19.951.250 (23,47 %)		
		Sub kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Output: • Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi; Outcome : • Jumlah dokumen promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan promosi;	Output: • Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi; Outcome : • Jumlah dokumen promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan promosi;		
		Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Output: • Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi Outcome : • Jumlah dokumen promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan promosi;	Output : • Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi Outcome : • Jumlah dokumen promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan promosi;		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Input: Rp. 387.154.470	Input: Rp.324.997.855 (83,94 %)	Telaahan dari data realtime OSS, masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan dasar perizinan;	-
		Sub Kegiatan : Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko.	Output: • Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik; Outcome: • Jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha	Output: • Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik; Outcome: • Jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha sesuai		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		<p>Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.</p> <p>Sub Kegiatan : Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>	<p>sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik; <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan; 	<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik; <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan; <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> • evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha; <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan; 		
		<p>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>Sub Kegiatan : Pengawasan Penanaman Modal</p>	<p>Input: Rp. 1.469.244.000</p> <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan 	<p>Input: Rp.1.401.032.900 (95,35 %)</p> <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan 	<p>Realisasi Investasi TW I : Rp. 976.074.977.806 (16,97%), Triwulan II : Rp. 815.688.900.000. , Triwulan III : Rp. 1.259.174.200.000. Triwulan IV : Rp. 1.167.100.000.000 Jadi total realisasi investasi s/d TW IV :</p>	-

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		<p>Sub Kegiatan : Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</p> <p>Sub Kegiatan : Bimtek kepada pelaku usaha</p>	<p>inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha;</p> <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa, dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha; <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dan merealisasikan kegiatan usahanya; <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis / sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko; <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah 	<p>serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha;</p> <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa, dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha; <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dan merealisasikan kegiatan usahanya; <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis / sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko; <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dikendalikan. 	<p>Rp.4.218.037.900.000 (67,36%), jadi tidak mencapai target 75%. (data sementara)</p>	

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			dikendalikan.			
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman modal	Input: Rp. 100.000.000	Input: Rp. 84.890.600 (84,89 %)		
		Sub Kegiatan : Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Output: <ul style="list-style-type: none"> Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan; Outcome: Jumlah perizinan dan non perizinan yang sudah terintegrasi secara digital;	Output: <ul style="list-style-type: none"> Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan; Outcome: Jumlah perizinan dan non perizinan yang sudah terintegrasi secara digital;		

3.1.2 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- Indikator Kinerja Prosentase Realisasi Investasi Meningkat. secara Nasional diberikan target, yaitu Tahun 2018 : Rp. 6,36 Triliun, Tahun 2019 : Rp. 7 Triliun, Tahun 2020 : Rp. 4,48 Triliun, Tahun 2021 : Rp. 7,3 Triliun, Tahun 2022 : Rp. 6,95 Triliun dan Tahun 2023 : Rp. 5,31 Triliun dan Tahun 2024 : Rp. 6,26 Triliun Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci RPJMD untuk Urusan Penanaman Modal : Indikatornya adalah Realisasi Nilai Investasi (PMA dan PMDN) ditargetkan setiap tahunnya yang harus dicapai adalah : Tahun 2019 : Rp. 5 Triliun; 2020 : Rp. 5,5 Triliun; 2021 : Rp. 5,7 Triliun; 2022 : Rp. 5,9 Triliun; 2023 : Rp. 6,2 Triliun dan tahun 2024 : Rp. 5,7 Triliun.

Perkembangan realisasi investasi di Provinsi NTT tahun 2018 s/d 2023 setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan (berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal). Rata-rata peningkatan atau penambahan nilai realisasi investasi di Provinsi NTT periode tahun 2018 – 2023 mencapai 1,45%. Tahun 2024 secara Nasional Target Realisasi Investasi Untuk Provinsi NTT sebesar Rp 6.260.000.000.000, dengan Realisasi Investasi Triwulan I Rp 976.074.800.000. atau sebesar 15,60 % dengan rincian sebagai berikut: Realisasi PMDN senilai Rp. 529.512.800.000 (14,10%) dari target Rp. 3.756.000.000.000; Realisasi PMA senilai Rp. 446.562.000.000 (17,83%) dari target Rp. 2.504.000.000.000. Realisasi Triwulan II Tahun 2024 Rp. 815.688.900.000,- atau sebesar 13,03 % dengan Rincian PMDN Rp. 516.870.900.000,- (13,76%) & PMA Rp. 298.818.000.000,- (11,93%). Realisasi Triwulan III Tahun 2024 Rp. 1.259.174.200.000,- atau sebesar 20,11 % dengan Rincian PMDN Rp. 656.555.900.000,- (17,48%) & PMA Rp. 602.519.000.000,- (24,07%). Realisasi Triwulan IV Rp. 2.167.100.000.000 dengan rincian PMDN Rp. 922.600.000.000 dan PMA Rp. 244.500.000.000 Jadi realisasi investasi Triwulan IV, yaitu Rp. 1.167.100.000.000 (18,64%), sehingga Total Realisasi Investasi Triwulan I s/d IV Tahun 2024 sebesar Rp. 4.218.037.900.000 atau sebesar 67,38% dengan realisasi PMDN Rp. 2.625.538.900.000 (69,90%) dan PMA 1.592.494.000.000 (63,60%) dengan jumlah proyek/kegiatan investasi 5.747 proyek, terdiri dari PMA : 1.102 proyek/kegiatan investasi dan PMDN : 4.645 proyek/kegiatan investasi.

- Indikator Kinerja Persentase Perizinan dan Non Perizinan

Dari 815 jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan ke DPMPTSP Provinsi NTT ada 54 jenis perizinan dan non perizinan

yang masih diterbitkan secara manual atau 6,63%, terdiri dari 31 jenis perizinan dan 23 non perizinan. Perizinan yang diterbitkan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dari jumlah perizinan yang diterbitkan, rata-rata peningkatan realisasi penerbitan izin dari tahun 2020 – 2023 adalah 9,25%. Secara tren realisasi penerbitan izin setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2020 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 3.500 izin realisasi sebanyak 4.868 izin yang diterbitkan atau 139,09 % dan tahun 2021 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 4.000 izin, realisasi jumlah izin yang diterbitkan mencapai 5.667 izin (113,34%) dan tahun 2022 target jumlah izin yang diterbitkan 5.000 izin, realisasi jumlah izin yang diterbitkan s/d Bulan Desember mencapai 6.626 izin atau 132,52%, melampaui target. Pada tahun 2023 jumlah izin yang diterbitkan secara melalui front office s/d 31 Desember 2023 sebanyak 7.703 izin (154,06%), dari target tahun 2023 sebanyak 5.000 izin yang diterbitkan. Capaiannya 154,06 %, Rata – rata 1 bulan \pm 642 izin yang diterbitkan, rata-rata per hari (22 hari kerja) \pm 29 izin yang diterbitkan.

Tahun 2024 target jumlah izin yang diterbitkan melalui front office DPMPTSP Provinsi NTT sebanyak 5.000 izin. Jumlah izin yang diterbitkan Januari – Desember 2024 sudah mencapai 5.373 izin atau 107,46%. Rata – rata 1 bulan \pm 448 izin yang diterbitkan, rata-rata perhari (22 hari kerja) \pm 20 izin yang diterbitkan. Data perkembangan jumlah izin yang diterbitkan tahun 2018 – 2024 yang diterbitkan melalui Front Office pada DPMPTSP Provinsi NTT.

- **Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.** Setiap Triwulan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan, dengan metode yaitu secara online melalui HP Android dengan menscan barcode yang ada serta melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang mengurus izin, kemudian mereka memberikan penilaian terhadap 9 (sembilan) aspek, yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku

pelaksana pelayanan, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan. Hasil survey ini dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil survey dan penilaian langsung masyarakat, terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan khusus untuk tahun 2023 adalah : Hasil Survey IKM TW I : 91,25; IKM TW II : 91,50 TW III : 92,1, dan hasil survey triwulan IV : 95 (sangat memuaskan), jadi capaian kinerjanya : 102,15%, di atas target yang ditetapkan, artinya senantiasa dilakukan pembenahan dan perbaikan pelaksanaan pelayanan. Hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2024 adalah Hasil survey Triwulan I: 93,37. TW II : 91,31 dan TW III : 92,53. Jadi capaian kinerjanya mencapai 97,4%.

➤ **Indikator Kinerja Jumlah Inovasi Yang Dikembangkan Tahun 2023 s/d 2024**

Sesuai target dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, adalah 5 (lima) inovasi yang dilakukan, realisasinya ada 5 (lima) inovasi yang dikembangkan (pengembangan dan inovasi baru) Tahun 2023. Jadi capaian kinerjanya 100%, dan ada 1 Inovasi di Tahun 2024. Adapun inovasi-inovasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sistem Pelayanan Jemput Bola (SiJempol) dan Sistem Penyerahan Izin Secara Langsung (SiPisel) memproses dan menerbitkan dokumen izin langsung di tempat dan mengantar langsung dokumen izin ke alamat pemohon oleh petugas. Melakukan penyerahan izin secara langsung ke alamat pemohon oleh para petugas.
- b. Survey Kepuasan Masyarakat Secara Online, ini merupakan pengembangan dari sebelumnya hanya dilakukan survey kepuasan masyarakat secara manual sekarang sudah bisa secara online dengan menggunakan Android.
- c. Pengaduan/Kritik/Saran Secara Online, merupakan pengembangan dari sebelumnya hanya dilakukan pengaduan melalui kotak saran yang disiapkan sekarang masyarakat sudah bisa gunakan secara online melalui Android.
- d. Sistem pelayanan data potensi dan peluang investasi (**e-Polusi**) daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaku usaha untuk memperoleh data dan peluang investasi di Povinsi NTT tinggal mengscane barcode yang ada.
- e. Inovasi **Inul Jebol** , dengan membuka Service Point / Gerai Layanan pelayanan pengurusan **Nomor Induk Berusaha (NIB)** melalui aplikasi Sistem **Online Single Submmision Risk Based Approach (OSS-RBA)** secara gratis tanpa

pungut biaya yang dilakukan di Kantor DPMPSTSP Provinsi NTT dan di lokasi-lokasi yang akan ditentukan, seperti di Kantor Dekranasda Provinsi NT dan Lippo Plaza Kupang. Untuk memfasilitasi bagi pelaku usaha (PMDN) termasuk UMKM dan non UMKM dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), proses migrasi dari OSS versi 1.1 ke OSS RBA serta untuk fasilitasi pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal secara online melalui System OSS RBA.

- f. Penyediaan **Klinik Konsultasi** Penanaman Modal. Klinik ini digunakan untuk pelayanan konsultasi bagi pelaku usaha yang bermasalah baik berkaitan dengan pelaporan LKPM, fasilitasi permasalahan dan hambatan yang dialami pelaku usaha juga termasuk permasalahan perizinan.

g. Grab PISEL

Pengantaran Izin langsung kepada customer (pisel) bekerjasama dengan pihak ketiga (Grab) dengan sistem pembayaran COD, setelah ijinnya selesai dilakukan orderan grab supaya langsung dibayar sama konsumen. Namun tidak menutup kemungkinan di waktu yang akan datang bisa digunakan juga untuk pengiriman berkas customer kepada Dinas DPMPSTSP Provinsi NTT.

h. Migrasi Izin Manual ke Izin si Cantik Cloud

Kegiatan Migrasi Perizinan Manual ke SiCantik Cloud dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan mempercepat proses pelayanan perizinan yang selama ini ada 2 jenis perizinan tertentu yang belum masuk dalam sistem OSS dan non perizinan yang dilaksanakan secara manual untuk di proses secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SiCantik Cloud, sehingga seluruh jenis pelayanan perizinan semuanya di proses secara elektronik.

Perkembangan Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan Di Provinsi NTT Tahun 2023

- Secara Nasional Target realisasi Penanaman Modal (PMA + PMDN) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sangat optimis tentunya berdasarkan data potensi yang ada serta iklim investasi yang sangat kondusif, dengan berbagai kemudahan berusaha yang dapat menarik minat investor lebih banyak lagi ke Indonesia. Pada tahun 2018 target realisasi investasi sebesar Rp.792,5 Triliun yang terdiri dari PMA : 494,7 Triliun dan PMDN Rp. 297,8 Triliun, tahun 2021 : Rp. 991,3 Triliun dan tahun 2022 target realisasi investasi Indonesia sudah mencapai Rp 1.128,3 Triliun cukup besar. Realisasi investasi tahun 2018

Rp. 721,2 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 392,7 Triliun dan PMDN : Rp. 328,6 Triliun. Realisasi investasi tahun 2021 : Rp. 901 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 454 Triliun dan PMDN : Rp. 447 Triliun serta Tahun 2022 realisasi investasi Indonesia : Rp. 5.124 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 1.604 Triliun dan PMDN : Rp. 3.519 Triliun, sedangkan Tahun 2023 Realisasi Investasi terhadap Target Renstra sebesar 8,32 Triliun adalah 51,85%. Sehingga untuk realisasi Triwulan IV Tahun 2023 : Rp. 5.246.840.000.000 dgn total proyek 2.816 proyek. Terdiri dari PMDN : Rp. 3.407.200.000.000 ada 2.350 proyek dan PMA : Rp. 1.839.640.000.000 ada 466 proyek sehingga capaiannya 98,81 %.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Dihadapi
1.	Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada pelaku usaha dengan menerbitkan Perda Provnsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Insetif dan Kemudahan Berusaha ;	Perda Provnsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Insetif dan Kemudahan Berusaha ;	Untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha
2.	Melakukan proses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan tanpa pungut biaya atau gratis	1. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP di daerah 2. PP nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 3. Rekomendasi KPK	1. Untuk meningkatkan minat pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah 2. Mewujudkan pelayanan perizinan yang bebas KKN.
3.	Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis elektronik dan non elektronik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik (<i>System Online Single Submission/OSS</i>), Membuka klinik konsultasi penanaman modal dan service point/gerai layanan bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dan permasalahan investasi lainnya ;	1. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP di daerah; 2. PP nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1. Untuk peningkatan realisasi investasi 2. Untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat
4.	Mendorong investasi di daerah untuk meningkatkan nilai tambah potensi sector unggulan melalui penyediaan dan pengembangan industri atau pabrik	Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi NTT Tahun 2016 - 2025	Untuk peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah investor
5.	Mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja serta berorientasi produk pangan dengan memberdayakan masyarakat setempat	Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Umum	Untuk peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah investor

		Penanaman Modal (RUPM) Provinsi NTT Tahun 2016 - 2025	
6.	Melakukan pemetaan potensi dan peluang investasi unggulan daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi	Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi NTT Tahun 2016 - 2025	Untuk peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah investor
7.	Melakukan promosi potensi dan peluang investasi melalui berbagai event baik dalam negeri maupun luar negeri	Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi NTT Tahun 2016 - 2025	Untuk peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah investor
8.	Meningkatkan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berbasis kerakyatan	Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi NTT Tahun 2016 - 2025	Untuk peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah investor
9.	Meningkatkan kerjasama kemitraan usaha investasi antara pemerintah dan dunia usaha serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan investasi	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal	Untuk peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah investor
10	Mengoptimalkan fungsi pengendalian (pembinaan, pengawasan dan pemantauan) pelaksanaan kegiatan investasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku	Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Untuk peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah investor
11	Mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab Satgas percepatan pelaksanaan berusaha tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Keputusan Gubernur NTT Nomor : 05/Kep/HK/2018 tentang Satuan Tugas Provinsi Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Provinsi NTT	Untuk peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah investor
12	Mendorong pembentukan lembaga adat di Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi permasalahan lahan yang terjadi	Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi NTT Tahun 2016 - 2025	1. Tujuan : Untuk peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah investor 2. Memfasilitasi penyelesaian masalah lahan untuk investasi (antara masyarakat dengan pelaku usaha).

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah Yang Dihadapi
1.	Pengawasan terhadap aktivitas investor perlu ditingkatkan sehingga semua investor yang melakukan penanaman modal di NTT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanaman modal secara teratur dan tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan fasilitasi pelaku usaha yang belum melakukan migrasi dari OSS versi 1.1 ke OSS RBA dan yang belum menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara online melalui system Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS RBA). Melakukan fasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan membuka <i>service point</i>/gerai layanan di kantor dan di tempat-tempat strategis. Membuka klinik konsultasi dan service 	<ol style="list-style-type: none"> Agar pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara berkala. Adanya peningkatan nilai realisasi investasi baik PMA

		point pelaporan LKPM bagi pelaku usaha serta fasilitasi penyelesaian masalah investasi.	maupun PMDN.
2.	Pendekatan dalam penyediaan data bagi kepentingan investor perlu dikembangkan, bukan saja aspek nominal atau angka potensi saja, tetapi perlu kelayakan potensi juga perlu diperhatikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2022 melalui pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal menyediakan materi promosi potensi investasi daerah berupa Video Promosi Digital (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris). 2. Pada tahun 2022 telah dilakukan kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Mice Pro Indonesia untuk penyusunan Buku Potensi dan Peluang Investasi Daerah Provinsi NTT dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 3. Melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi teknis (Perangkat Daerah Teknis, Perguruan Tinggi dan Bank Indonesia) untuk menyediakan dan melakukan kajian terhadap potensi unggulan daerah yang bernilai investasi melalui kajian studi kelayakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menyediakan data potensi unggulan daerah yang bernilai investasi yang siap ditawarkan kepada para investor. 2. Meningkatkan jumlah calon investor yang berinvestasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.


3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah Yang Dihadapi
1.	Satuan yang digunakan untuk menetapkan dan mengukur capaian kinerja program harus menggunakan satuan yang sama sehingga bisa dibandingkan	1. Melakukan penyesuaian satuan indikator kinerja antara satuan target dan realiasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar dapat dilakukan pengukuran pencapaian setiap indikator yang dirumuskan. 2. Agar masyarakat yang mengakses pelaporan kinerja dengan mudah memahaminya.
2.	Pencantuman capaian kinerja program harus disertai penjelasan dan data yang sesuai untuk menjamin tingkat akurasi atau akuntabilitas pelaporannya.	Untuk Penyusunan Pelaporan LKPJ dan pelaporan kinerja lainnya dilengkapi dengan penjelasan data dukung yang memadai.	Untuk peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelaporan pencapaian kinerja, serta penyajian data yang akurat dan terupdate.

3.5 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah Yang Dihadapi
1.	Indikator kinerja yang digunakan perlu disesuaikan dengan indicator kinerja yang tercantum dalam RPJMD perubahan tahun 2018 - 2023 sehingga pengukuran pencapaian antara rencana, target dan realisasi bisa akurat.	Melakukan penyesuaian Indikator kinerja dan target program dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026.	1. Agar dapat dilakukan pengukuran pencapaiannya dan sinkron dengan yang direncanakan. 2. Permasalahannya Penyusunan indicator dan target dalam perjanjian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTT dan IKU Perangkat Daerah.
2.	Informasi yang disampaikan dalam LKPJ ini harus lengkap mulai dari Program, Kegiatan sampai pada sub kegiatan sehingga pengukuran output dan outcomenya lengkap dan menyeluruh untuk setiap indicator kinerjanya.	Pelaporan kinerja output dan outcome sudah dilakukan per program, kegiatan dan sub kegiatan.	Untuk peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelaporan pencapaian kinerja, serta penyajian data yang akurat dan terupdate.
3.	Program I (Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal) dan Program V (Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal) adalah sangat penting. Program ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023. Program ini agar mutlak dilaksanakan dengan anggaran yang layak pada tahun 2024.	Pada tahun 2024 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sudah dialokasikan anggarannya.	1. Permasalahannya adanya keterbatasan fiskal /anggaran pemerintah daerah, sehingga ada penyesuaian anggaran pada perangkat daerah. 2. Untuk peningkatan realisasi investasi daerah.

SPt. Kepala Dinas Penanaman modal dan PTSP,
Provinsi Nusa Tenggara Timur

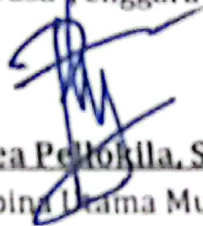

Noldy Hosea Pellokila, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19711127 199803 1 005

BAB IV.
PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 07 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Noldy Hosea Pellokilla, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711127 199803 1 005